

**Judul** : Kok Masih Ada Impor Beras ?  
**Tanggal** : Selasa, 31 Agustus 2021  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## Komisi IV Rapat Dengan Bulog

# Kok Masih Ada Impor Beras?

**Komisi IV DPR mempertanyakan impor beras sebanyak 41,6 ribu ton dengan nilai mencapai 18,5 juta dolar AS pada Juli lalu. Sementara, Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Pertanian (Kementan) tidak melakukan impor tersebut.**

WAKIL Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, total impor yang masuk ke Indonesia pada Juli 2021 mencapai 15,1 miliar dolar. Dari jumlah tersebut, beras menjadi salah satu penyumbang impor sebesar 41,6 ribu ton.

“Mohon penjelasan dari Pak Dirut (Direktur Utama Bulog Budi Waseso) apakah ini terjadi atau tidak?” tanya Satrio dalam rapat kerja Komisi IV bersama Perum Bulog di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Dirut Bulog Budi Waseso menegaskan, sampai saat ini pihaknya tidak menerima, dan juga tidak melaksanakan impor beras pada tahun ini. Soal impor beras yang disampaikan BPS, ditelusuri ternyata izin impor tersebut dikeluarkan untuk impor beras khusus.

“Beras khusus ini memang dulunya harus melalui Bulog.

Tapi kali ini, kami tidak pernah mengetahui mengenai izin impor beras khusus ini,” sambung eks Kabareskrim Polri ini.

Dijelaskan pria yang akrab disapa Buwas ini, sebenarnya impor beras khusus tidak terjadi tahun ini saja. Tahun lalu saja, terdapat sekitar 234 ribu ton impor beras khusus yang masuk ke Indonesia. Namun, impor beras tersebut bukan dilakukan oleh Bulog, tapi diberikan kepada beberapa instansi dan perusahaan.

“Itu yang perlu kami jelaskan, karena sampai saat ini Bulog pun tidak melakukan impor beras,” tegasnya.

Merespons pernyataan Buwas, Ketua Komisi IV Sudin menilai, adanya importasi beras ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsekuensi terkait tata kelola perberasan ini.

Sebab, izin impor beras khusus ini dilakukan tiba-tiba dan tanpa sepengertahan kementerian atau



**Budisatrio Djiwandono**

FOTO: NET

lembaga yang selama ini fokus dalam perberasan.

Sementara impor beras khusus ini berasal dari negara-negara yang memang sudah sering mengirim berasnya ke Indonesia seperti India, Pakistan, Vietnam dan Thailand. “Ini sesuatu hal yang gimana ya?” heran politisi senior PDIP ini.

Sudin sudah wara-wira mencari tahu benar tidaknya importasi beras ini, mulai dari Kementerian hingga Kemendag. Tapi kedua lembaga ini tidak tahu menahu soal importasi beras ini. Sementara, BPS membenarkan masuknya beras impor ini.

Saking penasarnya, politisi senior PDIP ini sampai harus ke

Direktorat Jenderal Bea Cukai hanya untuk memastikan kebenaran impor beras ini.

“Ini kan kendala-kendala, jangan ada yang disembunyikan informasi ini. Kita kan mencari jalan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini,” tambah dia.

Anggota Komisi IV Edward Tannur meminta agar pengawasan terhadap importasi beras khusus ini dilakukan secara ketat. Karena tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang ingin mengambil kesempatan dalam proses importasi ini.

Bisa saja dalam proses pelaksanaannya ikut masuk pula beras-beras komersial dari luar negeri.

Politisi Fraksi PKB ini pun berharap, masalah importasi beras khusus ini tidak perlu ditutup-tutupi. Justru sebaliknya, pemerintah harus menjelaskan bahwa importasi beras yang masuk tersebut hanya untuk jenis beras khusus yang memang tidak dapat diproduksi di Indonesia.

“Informasi ini yang perlu disosialisasikan secara baik sehingga petani tidak merasa dirugikan. Karena di satu sisi panen surplus, tapi di sisi lain pemerintah melakukan impor beras yang dapat menyebabkan harga gabah petani jatuh,” tambah dia.

Yang tidak kalah pentingnya, lanjut dia, harus ada kepastian terkait data pangan. Untuk itu, harus ada jaminan bahwa kebutuhan bahan pangan di lapangan dengan data BPS benar-benar sinkron dan akurat. Sehingga kebijakan diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Data ini yang perlu kita teliti, kaji ulang dan dilakukan uji petik. Jangan sampai data ini data mentah tapi sudah diberikan, sehingga kebijakan yang diambil tidak tepat,” pungkas politisi asal Nusa Tenggara Timur ini. ■ KAL